

## Media Monitoring

### 9 Rekomendasi UI Untuk Pemerintah

Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan sembilan poin utama dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai masukan yang berharga bagi pemerintah. Ketua MWA UI Saleh Husin, Rektor UI Prof Ari Kuncoro, Warek 1 UI Prof Abd Haris dan Dekan FEB UI Dr. Teguh Dartanto menyerahkan policy brief tersebut kepada Menko Ekonomi Airlangga Hartarto di Kantor Menko Ekonomi Jakarta (7/6).

1. 9 Rekomendasi UI terkait Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia | [https://medcom.id/s/ybJOX1Bk?utm\\_source=apps\\_android&utm\\_medium=share&utm\\_campaign=share](https://medcom.id/s/ybJOX1Bk?utm_source=apps_android&utm_medium=share&utm_campaign=share)
2. <https://investor.id/business/ui-rekomendasikan-9-poin-utama-pemulihan-ekonomi-nasional>
3. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5596955/stimulus-hanya-sementara-pemerintah-harus-apa-untuk-pulihkan-ekonomi>
4. [https://m.antaranews.com/berita/2197946/ui-rekomendasikan-sembilan-poin-utama-pemulihan-ekonomi-nasional?utm\\_medium=mobile](https://m.antaranews.com/berita/2197946/ui-rekomendasikan-sembilan-poin-utama-pemulihan-ekonomi-nasional?utm_medium=mobile)
5. <https://www.gatra.com/detail/news/513915?t=2>, UI Sampaikan Rekomendasi Strategi Pemulihan Ekonomi ke Pemerintah | Ekonomi,
6. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/nN94oz3K-ui-beri-rekomendasi-kebijakan-fiskal-moneter-ke-kemenko-perekonomian>
7. <https://ekbis.sindonews.com/read/448680/33/ini-rekomendasi-ui-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional-1623067562>
8. Sembilan Rekomendasi UI ke Pemerintah untuk Pulihkan Ekonomi  
<https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2021/06/08/sembilan-rekomendasi-ui-ke-pemerintah-untuk-pulihkan-ekonomi>
9. <https://www.beritasatu.com/photo/58409/rekomendasi-ui-untuk-strategi-pen>
10. <https://jaknews.id/ui-langkah-strategis-otoritas-fiskal-dan-moneter-untuk-soft-landing-dan-exit-strategy-pemulihan-ekonomi-nasional/>
11. <https://indonews.id/mobile/artikel/318218/UI--Langkah-Strategis-Otoritas-Fiskal-dan-Moneter-untuk-Soft-Landing-dan-Exit-Strategy-Pemulihan-Ekonomi-Nasional/>
12. <https://ceknricek.com/mobile/ui-langkah-strategis-otoritas-fiskal-dan-moneter-untuk-soft-landing-dan-exit-strategi-pemulihan-ekonomi-nasional/24641> Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. menyebut otoritas fiskal dan moneter harus mengambil langkah-langkah strategis untuk soft landing & exit strategy dalam pembiayaan pemulihan ekonomi nasional.
13. <https://m.suarakarya.id/detail/134189/UI-Otoritas-Fiskal-dan-Moneter-Harus-Mengambil-Langkah-langkah-Strategis-Untuk-PEN>
14. <https://www.odiyaiwuu.com/2021/06/08/universitas-indonesia-rekomendasikan/>
15. Otoritas Fiskal dan Moneter Diminta Ambil Langkah Strategis

<https://www.nttbersuara.com/2021/06/07/otoritas-fiskal-dan-moneter-diminta-ambil-langkah-strategis/>

16. <https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612023217/universitas-indonesia-serahkan-rekomendasi-baru-terkait-pemulihan-ekonomi-nasional>

17. <https://today.line.me/id/v2/article/RGNa6Z>

18. [https://m.mediaindonesia.com/galleries/detail\\_galleries/19056-langkah-strategis-otoritas-fiskal-dan-moneter](https://m.mediaindonesia.com/galleries/detail_galleries/19056-langkah-strategis-otoritas-fiskal-dan-moneter)

&

Policy Brief :

Webinar #1 MWA UI 25/1/21

Tentang Ekonomi :

Covid 19 & Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021

<https://online.fliphtml5.com/jsxii/vcch/>



Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menyerahkan rekomendasi kebijakan terkait strategi pemulihan ekonomi Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didampingi Sesmenko Susiwijono di Kantor Kemnko Perekonomian di Jakarta Pusat, Senin (7/6).

## UI Rekomendasikan 9 Poin Utama Pemulihan Ekonomi Nasional

Senin, 7 Juni 2021 | 22:44 WIB

### Terpopuler

**01** *Rights Issue* Direstui, Medco Siap Lepas 33,2% Saham

Jumat, 27 Agustus 2021 | 06:00 WIB

**02** Direksi Borong Saham AGRO 2,4 Juta Lembar, Ada Apa?

Sabtu, 28 Agustus 2021 | 09:51 WIB

**03** Grup Djarum Siapkan Rencana IPO Blibli

Jumat, 27 Agustus 2021 | 06:10 WIB

**04** Saham RIGS *Auto Reject* Atas, Scomi Marine Bakal Lepas 80,54% Saham Rig Tenders

Jumat, 27 Agustus 2021 | 10:54 WIB

**05** Indonesia Masuk Era 5G

# UI Rekomendasikan 9 Poin Utama Pemulihan Ekonomi Nasional

Senin, 7 Juni 2021 | 22:44 WIB

Nasori

**JAKARTA, investor.id** - Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan sembilan poin utama dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai masukan yang berharga bagi pemerintah. Rekomendasi ini menegaskan bahwa pemulihan ekonomi adalah sesuatu yang harus menjadi prioritas dalam kegiatan pascapandemi.

“Dalam rekomendasi ini, kami menyarankan untuk mencari titik tengah antara kesehatan dan ekonomi. Tentu ini tidak mudah, namun kalau semua unsur pemangku kepentingan di masyarakat mau bekerja sama dan berkolaborasi, hal yang sulit pun dapat menjadi mudah untuk dilakukan,” kata Rektor UI Ari Kuncoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/6).

Kesembilan rekomendasi UI yakni pertama, koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga di sektor moneter, keuangan dan fiskal perlu ditingkatkan untuk

menjaga harmonisasi orkestra kebijakan, sehingga sentimen pasar tetap positif dan stabil. Menjaga stabilitas indikator makroekonomi bertujuan mempertahankan kredibilitas, stabilitas dan menjaga sentimen pasar yang positif.

Kedua, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus memperhatikan kesinambungan fiskal jangka panjang. Kondisi pandemi menyebabkan terjadinya *accidental transformation* dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.

Ketiga, otoritas fiskal dan moneter harus mengambil langkah-langkah strategis untuk *soft landing & exit strategy* dalam pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya stimulus hanya bersifat sementara dan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Keempat, pemerintah memberi kemudahan dalam hal akses dan *disbursement* dana PEN, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek *good governance*. Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang terjadi, sehingga dana PEN dapat optimal digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Kelima, mendesain program PEN berdasarkan kebutuhan (*bottom up approach*), salah satunya adalah restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.

Keenam, penguatan ekosistem digital. Di sektor keuangan, diversifikasi produk jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan. Dengan terbatasnya mobilitas akibat pandemi, para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk.

Ketujuh, pemulihan sektor pariwisata secara bertahap secara kewilayahan berdasarkan analisis big data serta memfokuskan pada wisatawan nusantara. Adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kedelapan, penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial dengan jalan memperbaharui data penerima jaminan sosial sampai dengan kelompok 60% terbawah dengan pendekatan kombinasi metode PMT (*proxy mean testing*) dan *community based targeting* yang lebih sederhana. Selain itu, program jaminan/bantuan sosial harus bersifat adaptif dalam merespons perubahan yang terjadi di masyarakat dengan jalan *on demand application system* yaitu masyarakat secara mandiri dapat melapor jika memerlukan bantuan sosial.

Kesembilan, fleksibilitas penggunaan dana desa perlu diperpanjang hingga setidaknya 2022. Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Untuk menjaga akuntabilitasnya, monitoring berkala dan pengawasan penggunaan dana desa secara transparan harus menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Rekomendasi kebijakan terkait strategi pemulihan ekonomi Indonesia diserahkan Rektor UI Ari Kuncoro kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang didampingi Sesmenko Susiwijono di Kantor Kemenko di Jakarta Pusat, Senin (7/6).

Rekomendasi kebijakan ini disusun oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) berdasarkan hasil Webinar Majelis Wali Amanat (MWA) UI yang membahas “Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan” yang digelar pada Rabu, 27 Januari 2021 silam.



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
*Utami, Adhika, Sastra*

MAJELIS WALI  
AMANAT

**Policy Brief**

Webinar Series  
Majelis Wali Amanat UI  
**COVID-19 DAN PERCEPATAN  
PEMULIHAN EKONOMI 2021:  
HARAPAN, TANTANGAN DAN  
STRATEGI KEBIJAKAN**

## Kata Pengantar

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) adalah Badan tertinggi di Universitas Indonesia yang mewakili kepentingan Pemerintah, Masyarakat dan Kepentingan UI sendiri.

Tahun 2021, MWA UI menyelenggarakan seri webinar untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sehingga dapat dihasilkan sebuah pemahaman dan solusi. *Output* utama dari kegiatan webinar adalah *policy brief*. Seri webinar ini rencananya akan dilaksanakan selama 6 (enam) kali, dengan topik antara lain: Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, *Leadership*, *University Good Governance* dan Diplomasi Internasional sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan alternatif solusi.

Salah satu masalah besar bagi Indonesia adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini membawa dampak yang sangat signifikan di berbagai sektor baik bidang ekonomi, sosial maupun kesehatan dan diperkirakan akan menyebabkan terjadinya resesi global terbesar sejak perang dunia ke-2 (Bank Dunia, 2020). Secara nyata pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan ekonomi Indonesia.

Webinar seri pertama telah sukses diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan topik *Covid-19 & Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan and Strategi Kebijakan*. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, H.E. Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.M.T, hadir sebagai *keynote speech* membahas "Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021".

Webinar berlangsung dalam dua sesi dengan format diskusi panel. Diskusi panel sesi I dengan subtema Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional akan menampilkan pembicara Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Prof. Dr. Wimboh Santoso S.E., M.Sc., Ph.D., dan Wakil Ketua Umum Kadin, Franky Oesman Widjaja, serta Dosen FEB UI dan mantan Menteri Keuangan RI 2013-2014, Dr. Chatib Basri. Sesi ini dimoderatori Direktur



Pemberitaan Berita Satu Holding, Primus Dorimulu.

Pada diskusi panel sesi II dengan subtema Peranan Ekonomi Kreatif, UMKM, dan Dana Desa untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional diawali dengan *keynote speech* dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Sandiaga Uno dengan tema Peran Ekonomi Kreatif dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada diskusi panel sesi dua menampilkan pembicara Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., CEO dan Co-Founder Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, serta Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D dan Teguh Dartanto, Ph.D, Tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI. Bertindak sebagai moderator pada sesi kedua adalah Arif Budisusilo (Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Group).

Webinar seri pertama bidang ekonomi ini telah membahas bahwa proses pemulihan ekonomi nasional adalah kerja besar, sehingga perlu kerjasama, sinergi dan kolaborasi antara otoritas moneter, otoritas fiskal, otoritas jasa keuangan dan sektor riil. Pemulihan ekonomi nasional membutuhkan kebijakan yang bersifat *beyond conventional & extra miles*.

Kehadiran *policy brief* ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada serta dapat menyakinkan pengambil kebijakan dan dapat mengadopsi kebijakan yang diusulkan. Kami mengucapkan puji syukur dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang telah banyak membantu proses penyusunan hingga terselesaikannya *policy brief* ini.

Semoga bermanfaat.

Saleh Husin

## Kata Pengantar

Indonesia dan seluruh negara di dunia menghadapi Pandemi Covid-19 yang berdampak besar di bidang ekonomi, sosial dan kesehatan. Perubahan rantai pasok, penurunan aktifitas ekonomi serta kebijakan pembatasan sosial di berbagai daerah memiliki dampak besar terhadap kondisi kemiskinan, pengangguran, aspek sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi terburuk dalam 20 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan Triwulan-I 2021 masing-masing -2.07 persen dan -0.74 persen. Angka Kemiskinan Maret 2020-awal masa Pandemi Covid-19 telah meningkat sebesar 1.63 juta orang; sedangkan, angka pengangguran meningkat tajam sebesar 2,53 juta pekerja dan jumlah total tenaga kerja yang terdampak Covid-19 adalah sebesar 29,12 juta pekerja. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dengan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun, sedangkan anggaran PEN 2021 adalah sebesar 356.4 triliun. Berbagai kebijakan PEN 2020 dirasakan diharapkan mengurangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian nasional Indonesia.

Pemulihan Ekonomi Nasional sangat tergantung dari pengendalian Covid-19. Data per tanggal 22 Januari 2020, jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan mencapai 940 ribu kasus sedangkan angka kematian mendekati 27 ribu orang. Indonesia saat ini masih berada di tengah gelombang pertama, dan terus berusaha untuk menahan jumlah kasus yang terus meningkat sejak wabah pertama.



Keberadaan Vaksin Covid-19 memberikan harapan baru terhadap pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, keberadaan Vaksin Covid-19 tidak serta merta kita mengabaikan protokol kesehatan 3M: Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak.

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang dan persisten. Pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 sangat tergantung dari: 1. Pengendalian Pandemi Covid-19, 2. Kebijakan Nasional Pemulihan Ekonomi Nasional; 3. Besarnya dana pemulihan ekonomi nasional; 4. Kerjasama antara pusat dan daerah; 5. Peranan sektor UMKM, ekonomi kreatif, sektor pedesaan/pertanian yang saat pandemi menjadi tumpuan bagi tenaga kerja yang terkena PHK.

Kami sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan seri pertama webinar yang mengundang para pembicara yang sangat kompeten dan luar biasa yang mewakili pemerintah, pelaku usaha besar, pelaku usaha UMKM, pemerintah daerah, akademisi untuk mengulas isu pemulihan ekonomi Indonesia 2021. Hasil webinar tertuang dalam *Policy Brief* berjudul "Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021: Harapan, Tindakan dan Strategi Kebijakan". Kami berharap *policy brief* memberikan kontribusi terhadap pengambilan kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional Indonesia.

Rektor Universitas Indonesia

Prof. Ari Kuncoro, Ph.D



## Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan and Strategi Kebijakan

Disiapkan oleh

Dwi Nastiti Danarsari, Irfani Fithria U M., Teguh Dartanto

### Pendahuluan

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan di berbagai sektor baik bidang ekonomi, sosial maupun Kesehatan dan diperkirakan akan menyebabkan terjadinya resesi global terbesar sejak perang dunia ke-2 (Bank Dunia, 2020). Tidak terkecuali juga di Indonesia. Perubahan rantai pasok, penurunan aktivitas ekonomi yang substantial serta kebijakan pembatasan sosial di berbagai daerah memiliki dampak terhadap angka kemiskinan dan pengangguran, juga aspek sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan.

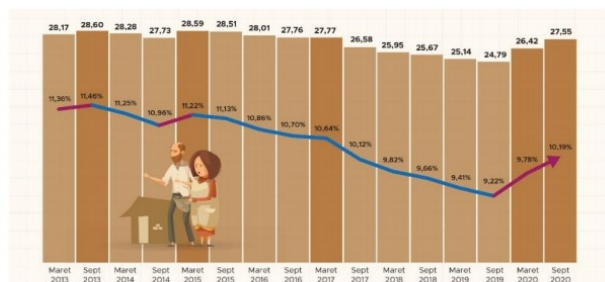
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi terburuk dalam 20 tahun terakhir. Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, kuartal III dan kuartal IV mengalami kontraksi yang cukup tajam yaitu masing – masing sebesar -5.32%, -3.49% dan -2,19%. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -2.07%. Jumlah penduduk miskin pada masa awal pandemi bulan Maret 2020 tercatat telah meningkat sebanyak 1,63 juta orang, sedangkan angka kemiskinan di bulan September 2020 kembali meningkat sebesar 1,13 juta orang. Di sisi lain, jumlah pengangguran juga meningkat tajam yaitu bertambah 2.53 juta pekerja dan jumlah tenaga kerja yang terkena dampak Covid-19 tercatat sebesar 29.12 juta pekerja.

Gambar 1. Pertumbuhan PDB 2014 - 2020



Sumber : BPS (2021)

Gambar 2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin 2013 - 2020



Sumber: BPS (2021)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengambil langkah strategis dalam rangka memulihkan perekonomian nasional melalui berbagai stimulus kebijakan. Sebagai langkah darurat, pemerintah untuk sementara mencabut batas defisit negara yang diatur sebesar maksimal 3% agar negara dapat memberikan besaran stimulus yang diperlukan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin dan juga mendukung dunia usaha agar tidak semakin terpuruk. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk PEN pada tahun 2020 adalah sebanyak Rp 695,3 triliun dan telah terealisasi sebesar 579,8 T. Program ini masih akan terus berjalan di tahun 2021 dengan besaran alokasi anggaran Rp 699,43 triliun. Program PEN yang difokuskan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha dan pajak, sektor prioritas dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan *survival* dan *recovery kits* untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelangsungan usaha.

**Gambar 3. Realisasi APBN 2020 – Feb 2021**

	Realisasi Sementara 2020	Alokasi 2021 (per 22 Feb 2021)	Growth (%)
<b>Belanja APBN</b>	<b>Rp2.589,9 T</b>	<b>Rp2.750,0 T</b>	<b>6.2</b>
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Rp579,8 T	Rp699,43 T	20.6
Kesehatan	Rp63,5 T	Rp176,3 T	177.6
Perlindungan Sosial	Rp220,4 T	Rp157,4 T	-28.6
Dukungan UMKM & Pembiayaan Korporasi	Rp173,2 T	Rp186,8 T	7.9
Insentif Usaha & Pajak	Rp56,1 T	Rp53,9 T	-3.9
Program Prioritas	Rp66,6T	Rp125,1 T	87.8
<b>Defisit (% PDB)</b>	<b>6,09%</b>	<b>5,70%</b>	

Sumber : Kemenkeu, Konferensi Pers APBN Kita (2021)

Peningkatan secara perlahan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 memberikan harapan mulai terjadinya pemulihan ekonomi di tahun 2021. Akan tetapi, kondisi pemulihan ini dapat dipenuhi jika pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dan tidak lagi menyebar secara meluas. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang dapat terjadi justru sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dimungkinkan untuk kembali menurun di tahun 2021 (Basri, 2021). Oleh karena itu, pengendalian Covid-19 menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Ketika kesehatan dapat dipulihkan, maka ekonomi akan dapat dipulihkan juga.

Bagaimanapun kunci keberhasilan berbagai program pemerintah juga sangat tergantung dari cara pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19. Data yang dirilis melalui situs Satgas Covid-19 per tanggal 1 Maret 2021 menunjukkan tren peningkatan kasus positif Covid-19 yang terus meningkat dimana posisi kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1,34 juta orang dengan angka kematian sebanyak 36 ribu orang. Keberadaan vaksin memberikan secercah harapan dan menjadi *game changer* dalam penanganan pandemi. Meskipun demikian, kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M tetap harus diperhatikan.

Tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih optimis meskipun dampak Covid-19 yang dirasakan masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan cenderung persisten. Oleh karena itulah, pemulihan ekonomi di tahun 2021 akan tergantung pada beberapa kebijakan :

1) pengendalian pandemik Covid-19, 2) kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 3) besarnya dana PEN, 4) kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, 5) peranan sektor UMKM, ekonomi kreatif, sektor pedesaan/pertanian yang menjadi tumpuan saat terjadinya pandemi bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan kerja.

## **2. Pengendalian Covid-19 Adalah Kunci: Trend Covid-19 & Vaksinasi & 3M**

Kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Menurut data Kementerian Kesehatan, per 31 Maret 2020, tercatat 1.528 kasus konfirmasi positif dengan tingkat kematian (*case fatality rate* atau CFR) sebesar 8.9%. Penyebaran Covid-19 sangat cepat dan masif. Kasus positif meningkat tajam, namun diikuti dengan penurunan pada tingkat kematian. Pada kuartal II 2020, tercatat 56.385 kasus positif dengan tingkat kematian sebesar 5,1%. Pada Oktober 2020, tercatat 410.088 kasus positif dengan tingkat kematian sebesar 3,4%, namun tingkat kematian di Indonesia masih lebih tinggi daripada tingkat kematian secara global sebesar 2,6%.

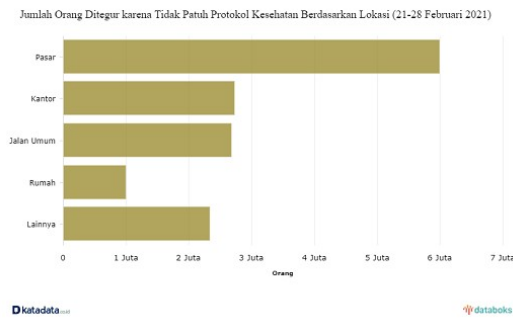
Upaya pengendalian Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah meliputi berbagai aspek. Pertama, meningkatkan akses deteksi dini Covid-19. Cepat dan masifnya penularan Covid-19 salah satunya disebabkan oleh adanya penularan melalui orang-orang yang tanpa gejala (Saputra & Salma, 2020). Pemerintah telah menambah jumlah laboratorium tes PCR, yang mana pada awal pandemi hanya tersedia kurang dari 10 laboratorium tes menjadi 250 laboratorium tes di seluruh Indonesia (Susanto et al. 2020). Selain itu, menurut Susanto et al. 2020, pada Oktober 2020, Pemerintah telah menetapkan batas atas untuk harga tes PCR sebesar Rp900.000. Dengan demikian, protokol untuk deteksi kasus dapat diakses secara lebih meluas dan pasien di rumah sakit dalam kondisi terinfeksi parah dapat dikurangi atau dicegah.

Kedua, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sejumlah daerah. PSBB dinilai mampu mengurangi risiko penularan Covid-19, yang ditunjukkan dengan tingkat penularan yang lebih rendah pada saat diberlakukan PSBB dibandingkan dengan periode setelah PSBB (Susanto et al. 2020). Akan tetapi, penerapan PSBB membawa dilema pada sisi ekonomi dan sisi kesehatan. Terbatasnya mobilitas berdampak pada melambatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sisi dunia usaha, ketika mobilitas rendah selama pandemi, maka skala ekonomis tidak akan tercapai. Perusahaan tidak akan menambah investasi mengingat kapasitas yang tersedia tidak sepenuhnya diutilisasi. Perusahaan mungkin masih mampu untuk menutupi biaya-biaya variabel, namun tidak mampu menutupi biaya tetap. Kondisi ini tentunya akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Namun di sisi lain, pelonggaran terhadap mobilitas dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19. Dengan demikian, jika dilakukan pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat, maka harus diiringi dengan kesiapan dalam penerapan protokol kesehatan dan fasilitas kesehatan publik. Masyarakat harus diedukasi untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Fasilitas kesehatan harus didukung oleh kecukupan tempat tidur di rumah sakit, termasuk ruang isolasi, dan ventilator. Selain itu, para dokter dan tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Ketiga, program vaksinasi. Penyediaan vaksin memiliki tantangan tersendiri. Jenis vaksin yang berbeda memiliki efektivitas yang berbeda pula. Tantangan berikutnya adalah dalam hal produksi massal dan distribusinya secara nasional. Menjaga rantai distribusi vaksin yang stabil sesuai persyaratan medis bukanlah hal yang mudah, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bloomberg Vaccine Tracker per 22 Februari 2021, Indonesia menduduki peringkat ke 18 secara global dalam hal penyediaan vaksin. Secara keseluruhan, terdapat sebanyak 92 negara yang telah melakukan vaksinasi. Oleh karenanya, walaupun penyediaan vaksin memiliki tantangan yang tidak mudah, namun ketersediaan vaksin menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian Covid-19. Meskipun demikian, di beberapa negara, seperti Taiwan, Vietnam, dan China telah mampu menurunkan kasus Covid-19 sebelum adanya vaksin. Keberhasilan ini disebabkan

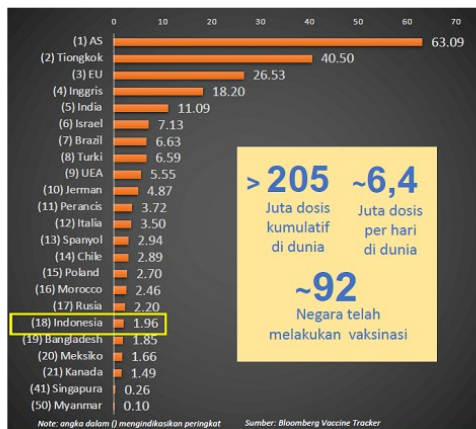
negara-negara tersebut telah memiliki pengalaman dalam penanganan kasus SARS dan juga didukung oleh kedisiplinan masyarakatnya dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara, Indonesia tidak berpengalaman menangani kasus SARS. Di samping itu, kedisiplinan masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan protokol kesehatan sangat beragam. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Penanganan Covid per awal Maret 2021, terdapat sebanyak 15 juta orang yang ditegur karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari jumlah tersebut jumlah terbanyak terdapat di kawasan pasar, disusul dengan kantor dan jalan umum.

**Gambar 4. Jumlah Orang Ditegur Melanggar Protokol Kesehatan (21 – 28 Feb 2021)**



Sumber : Katadata berdasarkan data Satgas Penanganan Covid 19

**Gambar 5. Perkembangan Vaksinasi Beberapa Negara (dalam juta dosis\*)**



Sumber : Kemenkeu, Konferensi Pers APBN Kita (2021), \* data per 22 Feb 2021

**Kebijakan PEN**

Program PEN merupakan respon cepat pemerintah dalam mengurangi dampak pandemi. Program ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi melalui 2 sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi

penawaran. Mengingat konsumsi rumah tangga adalah kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan, maka daya beli masyarakat perlu dijaga dalam rangka menjaga tingkat konsumsi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kantor Riset Bank Mandiri, dari data nasabah diketahui bahwa di antara tiga kategori pekerjaan nasabah (karyawan, wirausahawan dan pekerja informal), yang terkena dampak penurunan pendapatan paling signifikan adalah para pekerja informal<sup>1</sup>. Pada awal pandemi, pekerja informal telah kehilangan 10% pendapatan mereka dan kondisi ini semakin parah pada akhir tahun 2020 dimana pendapatan mereka turun sekitar 30%. Lebih lanjut, data yang dirilis desember 2020 dari kantor riset bank Mandiri tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok *middle-income* dan *lower-income* adalah penyumbang nilai belanja paling besar. Kelompok *middle-income* memiliki kontribusi sebesar 73% terhadap total belanja dan *lower-income* memiliki kontribusi sebesar 27% dari total belanja, bahkan belanja kelompok *lower-income* telah mencapai level pre-pandemi. Sedangkan kelompok menengah atas masih cenderung menahan belanjanya dikarenakan porsi terbesar belanja kelompok ini adalah *entertainment*, *durable goods* dan *housing*.

Alokasi terbesar dari program PEN ini ditujukan untuk stimulus sisi permintaan yaitu dengan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan yang terkena dampak paling parah karena pandemi. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 695,2T untuk perlindungan sosial masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), kartu sembako, subsidi listrik, BLT dana desa, bantuan sembako, pra-kerja dan sebagainya. Hingga tahun 2020 realisasi program PEN telah mencapai 579,78T atau setara 83,4% dari alokasi. Sedangkan dari sisi penawaran, pemerintah juga berusaha menjaga sisi produksi. Langkah ini dilakukan dengan cara memberikan insentif pajak, insentif kepabeanan dan cukai juga memberikan kemudahan pembiayaan dan keringanan bagi UMKM.

Akan tetapi, dari rangkaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, Sparrow, Dartanto & Hartwig (2020) memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah sudah cukup komprehensif, akan tetapi desain program tersebut adalah untuk pengentasan kemiskinan sebelum pandemi. Sasaran program tersebut diutamakan merupakan penduduk di kawasan pedesaan dan penduduk miskin, bukan diperuntukkan penduduk perkotaan dan *middle-income* yang terdampak sangat dalam karena pandemi. Selain itu, target penerima masih menggunakan basis data belum diupdate sejak tahun 2015 (Olivia, Gibson & Nasrudin, 2020). Basis data tersebut tidak dirancang untuk mengidentifikasi perubahan kesejahteraan rumah tangga dalam jangka pendek dan pergerakan keluar masuknya rumah tangga dari kemiskinan. Pemerintah perlu melakukan inovasi khususnya dalam sistem informasi yang berhubungan dengan basis data penerima bantuan untuk meningkatkan fleksibilitas target penerima bantuan. Fleksibilitas tersebut juga perlu dilakukan dalam rangka membantu UMKM. UMKM berskala kecil memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan yang berskala menengah dan besar, sehingga cakupan program UMKM seharusnya dapat mengakomodasi perbedaan kebutuhan tersebut.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan menurut Sparrow, Dartanto & Hartwig (2020) adalah pemerintah juga perlu memberikan bantuan berupa subsidi upah kepada pemilik usaha agar dapat mempertahankan pekerjaannya selama pandemi. Program yang ada justru langsung memberikan subsidi dari pemerintah ke pekerja. Kebijakan ini memang akan meningkatkan daya beli rumah tangga, akan tetapi di sisi lain perusahaan dan status pekerjaan pekerja justru menjadi rentan karena pelaku usaha juga terkena dampak pandemi. Isu lain terkait PEN yang paling krusial adalah penyerapannya yang masih rendah. Meskipun terjadi akselerasi penyerapan pada bulan September 2020 untuk jaring pengaman sosial dan bantuan UMKM, akan tetapi penyerapan untuk komponen lain masih rendah. Paket kesehatan hanya terserap sebanyak 30%, dukungan sektoral dan pemerintah daerah hanya sebanyak 26% dan insentif usaha hanya terserap 24% serta belum ada insentif bagi pembiayaan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena birokrasi pemerintah yang kewalahan terutama pada tahap pertama program tersebut

---

<sup>1</sup> Berdasarkan data mutasi masuk CIF nasabah bank Mandiri.

dilakukan. Faktor lain adalah sikap yang terlalu berhati-hati dan cenderung terpaku pada prosedur, akuntabilitas dan adanya kekhawatiran untuk berurusan dengan pengawasan seperti KPK dan BPK.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kenaikan angka kemiskinan di bulan Maret 2020 sebesar 1,63 juta dan di bulan September 2020 sebesar 1,13 juta. Kenaikan angka kemiskinan di bulan September 2020 jauh dibawah prediksi menimbulkan banyak pertanyaan baik dari aspek metodologi, pengumpulan data maupun efektifitas bantuan sosial selama pandemi. Angka kemiskinan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan di pulau Jawa atau lebih spesifik di wilayah DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten. Angka ketimpangan juga meningkat selama masa pandemi Covid-19 di mana angka Gini Index naik dari 0.380 (September 2019) menjadi 0.381 (Maret 2020) dan kemudian naik lagi menjadi 0.385. Berbeda dengan kondisi krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan peningkatan kemiskinan dan penurunan ketimpangan, sedangkan pandemi Covid-19 meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Kenaikan ketimpangan ini disebabkan salah satunya adalah *digital divide* (kesenjangan digital) antara kelompok kaya dan miskin serta karakteristik pekerjaan dimasing-masing kelompok pendapatan yang berbeda dimana kelompok kaya masih bisa bekerja secara WFH sedangkan kelompok miskin tidak bisa bekerja dengan WFH sehingga akan mengakibatkan kesenjangan antara kedua kelompok ini.

Terdapat berbagai bias dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia antara lain: *biased sectoral (agriculture, manufacture and services)*, *biased size of firms (Micro-Small-Medium Enterprises and Large Enterprises)*, *biased skills of worker (unskilled vs. skilled)*, & *biased region (rural vs. urban & by provincial level)*. Pemerintah harus mengantisipasi proses pemulihan yang tidak seragam yang pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan. Pemerintah juga harus memikirkan dan mengantisipasi dimensi jangka panjang khususnya yang terjadi karena perubahan struktural akibat pandemi dan dunia usaha yang masih lesu karena kondisi resesi jangka panjang yang mungkin terjadi. Jika pertumbuhan ekonomi tidak pulih, potensi eskalasi pengangguran akan menimpa pekerja sektor formal dan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah mengingat mereka tidak tercakup dalam program jaring pengaman sosial. Selanjutnya adalah potensi pengangguran dari pekerja yang memiliki ketrampilan rendah menjadi pengangguran struktural jika pemulihan ekonomi yang terjadi nantinya akan mendorong terjadinya bias ketrampilan yaitu mereka yang berketerampilan rendah dan upah yang rendah akan digantikan oleh kelompok yang lebih muda dan lebih berpendidikan. Kedua potensi ini masih luput dalam skenario pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

### **Kebijakan Sektor Moneter dan Keuangan**

Koordinasi kebijakan antar institusi pemerintah baik sektor moneter, keuangan dan fiskal agar ada keselarasan kebijakan menuju pemulihan ekonomi dan kesehatan. Pasar modal dan jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang terdampak pada awal – awal pandemi dengan adanya kepanikan pasar sehingga terjadi penurunan indeks yang cukup tajam pada awal Maret 2020. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal pandemi adalah mengeluarkan kebijakan untuk menahan agar pasar tidak terlalu panik sehingga indeksnya tidak terlalu dalam mengalami koreksi. Meskipun demikian, pada akhir Maret indeks saham tetap terkoreksi pada level terendah yaitu berada di bawah 4000. Akan tetapi koordinasi tetap harus dilakukan karena sentimen pasar juga dipengaruhi oleh respon pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan kesehatan. Selain itu, dampak pandemi ini juga akan dirasakan oleh sektor keuangan baik lembaga bank maupun non-bank. Mengingat dunia usaha juga terkena dampak signifikan, maka pemerintah mengambil langkah dengan cara melakukan moratorium dan restrukturisasi khususnya dalam peminjaman kredit agar tidak terjadi kredit macet. Program ini awalnya hanya didesain untuk satu tahun, akan tetapi kemudian program ini diperpanjang hingga tahun 2022. Berdasarkan data OJK per Januari 2021, jumlah total kredit perbankan yang direstrukturisasi mencapai 971.08 T atau 18% dari total kredit perbankan.

Sedangkan di lembaga keuangan non-bank jumlahnya juga cukup signifikan yaitu sebesar 191 T. Dengan kebijakan ini, jumlah NPL (*Non-Performing Loan*) saat ini tercatat hanya sebesar 3.2%.

Dari sisi moneter, secara berdampingan OJK juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) yang melakukan kebijakan pelonggaran likuiditas dan kebijakan moneter khususnya yang berkaitan dengan suku bunga dan giro wajib minimum (GWM) perbankan. BI juga memberikan subsidi bunga kepada para pemilik usaha agar dapat mempertahankan bisnisnya selama pandemi. BI juga terus berusaha untuk menjaga nilai tukar dan kepercayaan masyarakat untuk terhadap nilai tukar. Semua hal ini dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan menjadi sebuah orkestra kebijakan yang tidak kontradiktif. Sehingga pada akhir tahun 2020 dapat dikatakan bahwa sektor keuangan masih terjaga dan stabil, indeks IHSG juga kembali menyentuh angka normal bahkan sempat menyentuh angka 6400 yang menandakan sentiment pasar yang positif. Hal ini bisa disebabkan karena kelompok menengah atas yang biasanya menghabiskan dananya untuk liburan, karena pandemi mereka menahan untuk tidak liburan sehingga alokasi dananya mungkin dialihkan ke pasar modal.

Meskipun kredit UMKM sudah mengalami pertumbuhan sebagai respon terhadap stimulus yang dilakukan pemerintah, tetapi kredit belum tumbuh bagi kalangan pengusaha kelas besar (manufaktur, hotel berbintang, transportasi dan juga BUMN) karena penurunan skala usaha. Implikasinya adalah naiknya kredit UMKM juga diikuti dengan penurunan kredit produktif skala besar sehingga secara total kredit produktif hingga akhir tahun kemarin masih mengalami kontraksi sebesar -2.4%. Selanjutnya, kebijakan ke depan yaitu tahun 2021 yang akan dilakukan di antaranya adalah mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Di sektor jasa keuangan, keringanan dan kemudahan akan diberikan kepada sektor – sektor pembangkit ekonomi termasuk juga *real estate* terutama perumahan murah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Pemerintah juga akan memberikan kemudahan bagi pembiayaan sektor kesehatan dan yang terkait. Hal kedua yang menjadi fokus adalah tetap menjaga ketahanan dan daya saing sektor keuangan. Perbankan dan lembaga non-bank didorong untuk lebih mampu bersaing baik secara nasional maupun global dengan memperkuat permodalan dan diversifikasi produk yang berbasis teknologi.

Kebijakan sektor keuangan diarahkan untuk menciptakan pengembangan ekosistem jasa keuangan. Dalam hal ini akan dikembangkan infrastruktur pasar keuangan berbasis digital, inklusi keuangan yang lebih luas yang akan diarahkan menuju tercapainya program *Sustainable Finance* Indonesia sebagai salah satu langkah memenuhi tujuan SDGs. Oleh karena itu, kebijakan selanjutnya adalah mendukung terjadinya akselerasi transformasi digital di sektor keuangan. Untuk mengimbangi hal tersebut dan sebagai langkah adaptasi, secara internal OJK juga akan melakukan penguatan kapasitas internal terutama berkaitan dengan proses bisnis dengan melakukan integrasi data dan menjaga tata kelola yang baik. Tahun 2021, OJK memperkirakan bahwa kredit akan tumbuh pada angka 7.5% ( $\pm 1$ ), dana pihak ketiga tumbuh sebesar 11%, piutang pembiayaan juga tumbuh 4% serta penghimpunan dana di pasar modal sebanyak 150T – 180T. Pertumbuhan ekonomi juga diprediksikan pada angka yang optimis dimana pemerintah memperkirakan akan berada di kisaran 5%.

Program vaksinasi akan menjadi *game changer* dalam penanganan pandemi. Akan tetapi hal yang perlu juga diingat adalah bahwa vaksin bukan merupakan satu – satunya solusi penanganan pandemi. Protokol kesehatan harus tetap disiplin dilaksanakan untuk mengerem laju penularan dan infeksi virus yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan sebuah "*exit strategy*" mengingat stimulus tidak bersifat selamanya karena program ini bersifat 3T yaitu *Timing*, *Targeted* dan *Temporary* (Basri, 2020). Pemerintah harus dapat menentukan waktu yang tepat (*timing*) kapan stimulus tersebut harus dikurangi. Indonesia juga harus berusaha untuk segera menyelesaikan dan mengendalikan pandemi sebelum negara – negara maju seperti US melakukan normalisasi kebijakan agar tidak mendatangkan tekanan baik secara fiskal maupun moneter ke depan. Hal ini sejalan dengan rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan dimana tahun 2021 defisit fiskal akan diturunkan ke angka 5.5%. Dan

seperti yang telah dilakukan, beban defisit ini akan dibagi dan ditanggung secara bersama dengan BI yang melakukan pelonggaran kebijakan moneter.

Dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pengendalian pandemi yang baik tetap akan menjadi kunci dalam mengembalikan normalnya mobilitas masyarakat sehingga kegiatan ekonomi bisa didorong kembali. Dunia usaha juga perlu melakukan adaptasi dan digitalisasi lebih cepat dalam rangka menyesuaikan perubahan yang terjadi karena pandemi ini telah menyebabkan terjadinya *accidental transformation*. Perilaku konsumen juga akan berubah dan pembatasan sosial membuat sistem belanja bergeser dan transaksi banyak dilakukan secara daring. Tentunya ini merupakan suatu peluang yang sangat bagus yang harus dimanfaatkan dunia usaha untuk mengubah cara mereka melakukan bisnisnya.

### **Sektor Riil: Inovasi, Digitalisasi dan Kreatifitas**

PSBB yang diberlakukan pada awal pandemi Covid-19 telah menurunkan mobilitas masyarakat secara drastis. Untuk wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 tahun 2020, selama PSBB dilakukan pembatasan atas aktivitas di luar rumah yang meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta pergerakan orang dan barang menggunakan transportasi. Beberapa sektor usaha dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, yaitu sektor kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian, sektor-sektor usaha yang dikecualikan tersebut tetap diwajibkan memenuhi protokol kesehatan. PSBB menurunkan mobilitas penduduk hingga 60% (Dartanto & Yudhistira, 2020).

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2018 UMKM berkontribusi terhadap sekitar lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Dengan dibatasinya mobilitas masyarakat memang menurunkan risiko penularan Covid-19, namun di sisi lain berakibat pada perlambatan aktivitas ekonomi, tidak terkecuali dampaknya dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya UMKM. Sektor informal mengalami penurunan pendapatan terbesar, kemudian diikuti oleh para wirausahawan yang juga mengalami penurunan pendapatan. Sementara, para karyawan relatif tidak terlalu terpengaruh karena pendapatannya bersumber dari gaji yang sifatnya relatif tetap. Walaupun UMKM merupakan sektor yang terkena dampak buruk akibat pandemi, namun UMKM juga menjadi katalis dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi karena peran UMKM sebagai penggerak inovasi dan penyerap tenaga kerja (Castro & Zameño, 2020). Dengan demikian, penguatan UMKM untuk keluar dari kesulitan selama pandemi menjadi salah satu isu penting dalam pemulihan ekonomi.

Pelaku usaha, khususnya UMKM, menghadapi kesulitan dari sisi pendapatan maupun biaya akibat pandemi Covid-19 ini. Pergeseran perilaku konsumen sebagai dampak perubahan mobilitas selama PSBB menurunkan pendapatan UMKM secara signifikan. Ketika terjadi pandemi, dengan ditutupnya berbagai tempat keramaian, para pelaku usaha kehilangan sumber pendapatan yang berasal dari pengunjung tempat-tempat keramaian tersebut. Di saat yang sama, pelaku usaha juga harus menanggung biaya yang lebih besar karena di samping menutupi biaya operasionalnya, pelaku usaha wajib memenuhi protokol kesehatan, yang mana akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, dengan dibatasinya mobilitas orang dan barang, maka rantai pasokan bahan baku pun mengalami gangguan. Lebih lanjut, ketika pelaku usaha berusaha menjangkau konsumennya, distribusi produk ke konsumen juga mengalami kendala.



Agar dapat bertahan pada badai pandemi Covid-19, tidak ada pilihan lain bagi pelaku usaha termasuk UMKM selain berperilaku adaptif dan inovatif. Strategi lama, yang mengandalkan pada kunjungan konsumen ke toko atau gerai serta pemasaran secara konvensional, tidak lagi dapat diharapkan efektivitasnya. Untungnya, kemajuan teknologi dan digitalisasi yang berkembang pesat hingga tahun 2021, dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk UMKM untuk dapat bertahan bahkan berkembang di masa sulit ini.

Dalam suatu kesulitan, tentu tetap ada peluang untuk bertahan atau bahkan berkembang. Beberapa pelaku usaha, termasuk UMKM yang mampu bertahan selama kondisi pandemi adalah mereka yang mampu mentransformasikan bisnisnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Mengubah sistem pemesanan dan pembayaran menjadi secara daring, menggunakan aplikasi digital, memetakan konsumen menggunakan analisis *Big Data*, mempromosikan produk melalui sosial-media, melakukan kerjasama dengan perusahaan pengantar barang adalah beberapa contoh pemanfaatan teknologi dan digitalisasi agar dapat bertahan di masa pandemi.

Berbagai sektor usaha, di wilayah perkotaan maupun pedesaan terkena dampak buruk dari pandemi Covid-19. Di antara sektor-sektor yang terkena dampak buruk pandemi Covid-19, salah satu sektor yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif adalah sektor pertanian. Lebih lanjut jika dibandingkan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, tingkat pengangguran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan (Dartanto & Yudhistira, 2020). Dengan demikian, dapat dilihat adanya potensi dari sektor pertanian dan kawasan pedesaan yang dapat membantu pemulihan ekonomi akibat dampak buruk pandemi Covid-19.

Program Dana Desa dimulai pada tahun 2014 melalui amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai sumber pembangunan. Di masa pandemi Covid-19, Pemerintah memperkenankan sebagian penggunaan Dana Desa untuk kegiatan penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan penglokasiannya untuk tiga hal yaitu: (1) pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) mengadakan Program Padat Karya Tunai Desa (PKDT); dan (3) Dana Desa difungsikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) ([www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id)).

Sebelum masa pandemi, Dana Desa dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai tujuannya, namun tidak dapat dilepaskan dari tantangannya. Pada sejumlah desa, Dana Desa dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi seperti peningkatan aktivitas padat karya dan penyediaan modal usaha, serta perbaikan layanan kesehatan. Akan tetapi, di sisi lain pada beberapa desa, karena kurangnya monitoring dan pengawasan, Dana Desa hanya digunakan oleh segelintir orang-orang di sekitar pimpinan desa dan pimpinan desa cenderung menyalahgunakan Dana Desa (Dartanto & Yudhistira, 2020). Terkait dengan alokasi Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19, pada desa-desa yang telah memiliki infrastruktur, sanitasi kesehatan, dan koneksi internet yang cukup baik, penggunaan Dana Desa dapat mempercepat pemulihan ekonomi di desa-desa tersebut (Dartanto & Yudhistira, 2020). Sementara, pada desa-desa yang masih tertinggal, Dana Desa dapat membantu pemulihan ekonomi, namun dampaknya tidak sebesar pada desa-desa yang lebih berkembang.

Penguatan UMKM dan kawasan pedesaan menjadi upaya penting dalam pemulihan ekonomi akibat dampak buruk pandemi Covid-19. Dengan terbatasnya mobilitas masyarakat, transformasi ke arah digitalisasi sangat krusial agar dapat bertahan dan berkembang di masa sulit. Namun demikian, pemahaman dan kemampuan UMKM terhadap adopsi teknologi tidak sama. Selain itu, kesiapan infrastruktur di desa dalam hal koneksi internet pun tidak sama. Oleh karenanya, dibutuhkan andil Pemerintah Pusat dan Daerah serta pihak swasta untuk mengupayakan pemulihan secara bersama-sama. Di sektor pertanian, dibutuhkan pembinaan

dan pendampingan menyeluruh tidak hanya dari sisi proses produksi hasil pertanian, tetapi juga pada aspek pemasaran, kepastian harga, pemanfaatan teknologi, serta literasi keuangan. Bagi UMKM dibutuhkan pembinaan dan pendampingan dalam kesiapan teknologi, pengetahuan mengenai pemasaran secara digital, jejaring untuk pembeli potensial dan ketersediaan bahan baku.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang terkena dampak langsung pandemi juga perlu mendapat perhatian. Inovasi dan adaptasi lagi – lagi menjadi kunci dalam hal ini. Jumlah kunjungan wisatawan tidak lagi dibuat dalam target yang *rigid*, akan tetapi menggunakan bantuan *big data* khususnya untuk memetakan potensi pariwisata dari wisatawan nusantara. Selain itu, destinasi wisata juga harus melakukan adopsi dan adaptasi terhadap kondisi pandemi. Kolaborasi dengan berbagai pihak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menjadi kunci utama. Program inkubasi juga menjadi salah satu kebijakan krusial yang perlu dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di antaranya untuk membantu menciptakan produk yang menarik dari sisi desain kemasan, pemasaran dan peningkatan nilai jual.

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan kajian mengenai harapan, tantangan dan strategi kebijakan, maka kami menyarankan berbagai rekomendasi kebijakan:

1. Koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga di sektor moneter, keuangan dan fiskal perlu ditingkatkan untuk menjaga harmonisasi orkestra kebijakan, sehingga sentimen pasar tetap positif dan stabil. Menjaga stabilitas indikator makroekonomi bertujuan mempertahankan kredibilitas, stabilitas dan menjaga sentimen pasar yang positif.
2. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang serta antisipasi jangka panjang terhadap kesinambungan fiskal. Kondisi pandemi menyebabkan terjadinya *accidental transformation* dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.
3. Otoritas fiskal dan moneter harus mengambil langkah-langkah strategies untuk *soft landing & exit strategy* dalam pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya stimulus hanya bersifat sementara dan tidak dapat dilakukan secara terus – menerus dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan PEN.
4. Pemerintah kemudahan dalam hal akses dan *disbursement* dana PEN, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek *good governance*. Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan dan juga akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang terjadi, sehingga dana PEN dapat optimal digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi.
5. Mendesain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan kebutuhan (*bottom up approach*). Salah satunya: restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi UMKM agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.
6. Penguatan ekosistem digital. Di sektor keuangan, diversifikasi produk jasa keuangan berbasis teknologi digital sangat perlu dilakukan. Dengan terbatasnya mobilitas akibat pandemi, para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk. Pembinaan dan pendampingan menyeluruh bagi UMKM perlu dilakukan, selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan.
7. Pemulihan sektor pariwisata secara bertahap secara kewilayahan berdasarkan analisis analisis *big data* serta memfokuskan pada wisatawan nusantara. Adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan

berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif.

8. Penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial dengan jalan memperbarui data penerima jaminan sosial sampai dengan kelompok 60% terbawah dengan pendekatan kombinasi metode PMT (*proxy mean testing*) dan *community based targeting* yang lebih sederhana. Selain itu, program jaminan/bantuan sosial harus bersifat adaptif dalam merespon perubahan yang terjadi di masyarakat dengan jalan *on demand application system* yaitu masyarakat secara mandiri dapat melapor jika memerlukan bantuan sosial.
9. Fleksibilitas penggunaan dana desa perlu diperpanjang hingga setidaknya tahun 2022. Dalam masa pandemi, dana desa berfungsi untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat desa. Untuk menjaga akuntabilitasnya, monitoring berkala dan pengawasan penggunaan dana desa secara transparan harus menjadi prioritas yang harus dilakukan.

Terlepas dari semua kebijakan yang dilakukan, pengendalian pandemi menjadi prasyarat penting bagi pemulihan ekonomi karena pandemi yang terkendali dapat mendorong pemulihan mobilitas masyarakat secara gradual sehingga perekonomian akan menggeliat kembali. Adanya vaksin akan menjadi *game changer* akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa hal ini bukan merupakan satu – satunya cara. Walaupun demikian, kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Kampanye 3M atau bahkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) harus selalu disosialisasikan melalui berbagai media yang juga diikuti dengan tindakan tegas bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan.



UNIVERSITAS  
INDONESIA  
*Veritas, Probitas, Justitia*

MAJELIS WALI  
AMANAT

  @ui\_mwa

[www.mwa.ui.ac.id](http://www.mwa.ui.ac.id)